

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kapitalisme Menurut Marx

Bagi Marx (Kristeva, 2012: 301), kapitalisme bukan ditentukan oleh motivasi atau orientasi kaum kapitalis. Tidak peduli motif apa yang mereka ketahui, mereka nyatanya digerakan oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme Marx adalah satu bentuk masyarakat kelas yang diatur dengan cara khusus dimana orang diorganisir untuk menghasilkan kebutuhan hidup.

Marx dalam halaman pertama dari *Capital*, menyebut kapitalisme sebagai suatu sistem produksi komoditi. Namun Marx dalam karyanya senantiasa memberi fokus utamanya terhadap dinamika orang-orang borjuis, dimana sasaran utama *Capital* adalah menguak *hukum ekonomi mengenai gerak* masyarakat melalui sebuah pengkajian terhadap dinamika dasar produksi di tempat masyarakat tersebut berada.<sup>1</sup> Landasan mutlak yang diperlukan oleh kapitalisme dipecahkan oleh Marx sebagai sebuah paradoks nyata, yaitu fakta bahwa para buruh *bebas* menjual tenaga kerja mereka di pasar terbuka. Artinya, daya kerja itu sendiri (buruh/pekerja) merupakan suatu komoditi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Marx: *Theory of Surplus Value*. Ed. G.A. Bonner and E. Burns. (London, 1951).

<sup>2</sup> Anthony Giddens. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Webber*. (Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press), 2009), hlm. 61

Seiring berkembangnya cara produksi barang secara modern dan produksi industri, buruh dipaksa untuk memproduksi lebih banyak dari rata-rata kerja perhari, produksi menjadi lebih banyak dibandingkan kebutuhan untuk menutupi biaya hidupnya. Apa pun yang dihasilkan si buruh di atas rata-rata kerjanya disebut *nilai surplus*. Produksi dari surplus dapat diambil-alih haknya oleh kapitalis, sehingga rasio antara kerja yang diperlukan dengan kerja surplus oleh Marx disebut sebagai *tingkat pemerasan*.

Pada dasarnya, kapitalisme merupakan suatu sistem anarkhi, karena pasaran tidak diatur oleh lembaga manapun dalam menghubungkan produksi dengan konsumsi. Sehingga setiap kali tidak dihasilkannya suatu imbalan yang mampu menutup modal yang ditanam, modus operandi kapitalisme pasti rusak. Namun menurut Marx, kondisi krisis justru adalah jalan keluar sementara, dan bisa dipaksakan dari kontradiksi-kontradiksi yang ada. Dampak dari krisis sendiri ialah untuk mendorong modal semakin tersentralisasi sehingga untuk sementara waktu sistem kapitalisme terkonsolidasi. Sedang kelompok pengangguran yang kronis adalah sebuah keharusan dalam kapitalisme, mereka disebut *angkatan cadangan* dalam industri.

Perkembangan kapitalisme secara khusus dicirikan oleh meningkatnya kesenjangan relatif antara pendapatan kelas pekerja dan pendapatan kelas kapitalis. Perkembangan kapitalisme telah menghasilkan *angkatan cadangan* yang semakin besar, yang sebagian besar dari mereka terpaksa hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Sementara kelas kapitalis terus mengumpulkan kekayaan, upah pekerja tidak boleh melebihi standar hidup. Ini sehubungan dengan dampak dari adanya

*nilai surplus* (nilai lebih) dimana kapitalis akan terus memacu pengumpulan akumulasi modal dengan cara memperpanjang jam kerja buruh, mengurangi upah atau pemenuhan kebutuhan buruh, namun tetap meningkatkan produktivitas buruh melalui penyediaan teknologi sebagai penunjang.

## **B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter**

Satu dari beberapa pendapat Schumpeter (Hasan & Azis, 2018) yang dijadikan dasar teori ialah kepercayaannya terhadap kapitalisme sebagai sistem terbaik dalam menciptakan pembangunan ekonomi secara pesat. Meskipun di sisi lain ia memiliki pendapat yang sama dengan kaum klasik bahwa dalam jangka panjang kapitalisme akan mengalami stagnasi. Schumpeter mengajukan tiga poin utama mengenai sistem kapitalis. *Pertama*, sistem kapitalis adalah sistem yang paling *klop* untuk munculnya pembangunan ekonomi dan inovasi pertumbuhan ekonomi. Pemikiran Schumpeter sangat cocok diterapkan pada penerapan sistem kapitalis yang bertujuan mengejar kemajuan ekonomi negara-negara berkembang (*output growth*).

*Kedua*, Schumpeter percaya jika sistem kapitalis dalam jangka panjang dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Dan pada saat yang sama, distribusi pendapatan tersebut akan lebih merata. Distribusi pendapatan yang lebih merata ini karena inovasi akan memberikan dampak terhadap tak terbatasnya produk konsumen.

*Ketiga*, Schumpeter mengatakan jika sistem kapitalis dalam jangka panjang akan “runtuh” karena perpindahan bertahap sistem ini ke arah sistem sosialis.

Karakteristik sistem kapitalis sendiri akan turut mengalami perubahan sebab keberhasilannya dalam meraih kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan terjadi fenomena perubahan institusional. Persepsi masyarakat juga akan berubah, masyarakat akan semakin jauh dari sistem kapitalis murni. Hal ini tercermin dari adanya sistem tunjangan sosial bagi masyarakat miskin, pendidikan murah atau bahkan gratis, serta sistem asuransi warga.

Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter (Sukirno, 2006) menegaskan mengenai inovasi bagi para pengusaha atau wirausahawan serta mengenai kemajuan teknologi yang hanya dapat dilihat oleh orang yang berkemampuan memprediksi peluang dan punya keberanian mengambil resiko dengan menciptakan usaha baru atau memperluas usaha yang telah dimiliki. Dengan adanya usaha baru ataupun perluasan usaha tersebut, lapangan pekerjaan akan tersedia bagi penyerapan angkatan kerja yang setiap tahun bertambah. Schumpeter percaya bahwa pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam masyarakat yang menghargai dan mendorong tiap-tiap hal baru (inovasi) yang diciptakan setiap orang. Lingkungan yang paling cocok adalah masyarakat yang mengenal paham *laissez-faire*, bukan masyarakat sosialis atau komunis yang cenderung menutup kemampuan kreatif penghuninya. Dalam masyarakat yang menjalankan mekanisme pasar, besar-kecilnya insentif yang akan diperoleh atas inovasi-inovasi yang ditemukan lebih besar daripada insentif yang didapat masyarakat sosialis.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, Schumpeter juga menyebutkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi. Meski

demikian, kedua hal tersebut ialah sumber peningkatan *output* masyarakat, yang selanjutnya disebut kemajuan ekonomi. Pendapat Schumpeter mengatakan jika pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh peningkatan terus menerus dalam kuantitas faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi tanpa ada pembaruan dalam teknologi produksinya. Misalnya, tanpa mengubah teknologi produksi lama, peningkatan *output* karena peningkatan stok modal atau peningkatan produksi tetap terjadi. Sedang pembangunan ekonomi adalah peningkatan *output* yang ditimbulkan oleh inovasi kewirausahaan.

Inovasi di sini tidak semata pembaruan teknologi besar-besaran, namun inovasi juga bisa diwujudkan dalam penemuan produk baru, akuntansi untuk pasar baru dan lain-lain. Inovasi adalah tentang perubahan ke arah lebih baik dalam segi kuantitatif dalam sistem ekonomi itu sendiri, yang dihasilkan dari kemampuan kreatif para wirausahawan. Peran wirausahawan dalam merealisasikan produk yang inovatif sangatlah penting, sebab pada dasarnya semua alat kerja dan mesin tidak dapat bekerja optimal tanpa siapa yang menggunakan atau mengoperasikannya.

### **C. Teori Dependensi**

Buku *Capitalism and Underdevelopment in Latin America* (1967) karya Andre Gunder Frank memaparkan keberadaan teori ketergantungan secara mendalam, dan menganggapnya sebagai pelopor lahirnya teori dependensi. Frank (1967) dalam bukunya membagi negara-negara di dunia menjadi dua kelompok, yaitu negara pusat atau *core* dan negara pinggiran terbelakang atau *periphery*.

Dalam bukunya ia juga menjelaskan asumsinya tentang teori ketergantungan. Hipotesis yang dibahas terdiri dari lima bagian, yaitu: (1) keadaan ketergantungan dalam sebuah negara bisa diidentifikasi berdasar fenomena yang sangat umum. Ini berlaku untuk semua negara periferal atau negara dunia ketiga. Dalam hal ini, teori ketergantungan pada dasarnya mencoba untuk menggambarkan ciri-ciri umum atau ciri-ciri keadaan ketergantungan dunia ketiga dari perkembangan kapitalisme pada abad ke-16 hingga saat ini.

(2) ketergantungan dianggap sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh variabel “eksternal”. Di sini, variabel paling penting yang harus diwaspadai sebagai penghambat kemajuan sebuah negara pada hakikatnya bukanlah kekurangan modal dan tenaga kerja ataupun kewirausahaan yang negara tersebut miliki, tetapi pengaruh sistem politik dan ekonomi. Di antaranya variabel-variabel tersebut berada di luar jangkauan kemampuan negara. Selain itu, variabel eksternal lain yang mengakibatkan ketergantungan adalah karena warisan sejarah dan budaya kolonialisme yang mendarah daging di dalam masyarakat (Frank, 1967).

(3) masalah ketergantungan suatu negara dianggap atau cenderung dianggap sebagai masalah ekonomi. Ini disebabkan aliran surplus ekonomi dari negara dunia ketiga ke negara maju atau negara inti. Inilah sebabnya mengapa negara-negara dunia ketiga mengalami ketergantungan yang dibawa oleh kesulitan, yang mengarah pada penurunan nilai tukar relatif. (4) keadaan ketergantungan ialah unsur yang tak terpisahkan dari polarisasi regional sistem ekonomi global. Pada satu sisi, aliran surplus ekonomi dari dunia ketiga berkemungkinan menyebabkan keterbelakangan, namun pada sisi lain justru berkemungkinan sebagai variabel yang

mendorong pembangunan negara-negara maju. (5) Frank melihat ketergantungan sebagai sebuah keadaan yang sangat berseberangan dari pembangunan. Menurut teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran adalah kemustahilan. Teori dependensi (Frank, 1967) berkeyakinan jika surplus ekonomi yang terus didistribusikan ke negara maju dengan siklus yang terus menerus memiliki kemungkinan yang hampir nol, pun dengan pembangunan otonom dan berkelanjutan.

Dos Santos (Kuncoro, 2000) membagi ketergantungan menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) ketergantungan kolonial (*colonial dependence*), adalah ketergantungan pada kegiatan monopoli perdagangan luar negeri pada masa kolonial. Diikuti oleh monopoli sumber daya lain oleh penjajah, (2) ketergantungan finansial industri (*industrial-financial dependence*), adalah ketergantungan terhadap modal besar yang mendominasi di negara-negara penjajah dengan cara berinvestasi pada produksi bahan mentah pokok untuk tujuan konsumsi di negara jajahan. (3) ketergantungan industri teknologi (*technological-industrial dependence*), adalah ketergantungan pada investasi perusahaan multinasional di negara berkembang setelah Perang Dunia II.

Dari perspektif ini, Dos Santos (Kuncoro, 2000) menyuguhkan argumen yang cakupannya lebih besar jika siklus ketergantungan negara miskin tidak semata berasal dari variabel eksternal. Tetapi, berasal dari variabel internal negara tersebut juga. Inilah mengapa ketergantungan tetap terjadi meskipun negara telah merdeka. Maka yang diperlukan oleh negara-negara pinggiran ialah lebih dulu memprioritaskan penyelesaian problematika ketergantungan internal dalam

kegiatan ekonomi nasional sebelum kemudian melepaskan diri dari ketergantungan eksternal.

#### **D. Sejarah Kapitalisme di Indonesia**

Negara-negara Barat mencapai Indonesia melalui kemitraan perdagangan *Indische Vereeniging Ost Company* (VOC) yang didirikan di Indonesia untuk memperkuat para kelompok kapital di Nusantara. Mereka berdampak pada sistem ekonomi Nusantara dengan memperkenalkan sistem monopoli dalam perdagangan dan eksploitasi alam pun tenaga manusia. Pada hari terakhir tahun 1799 VOC dibubarkan dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak hari pertama di tahun 1800, Indonesia menjadi koloni Belanda.

*Batavische Republik* adalah sekutu Prancis dan karenanya bergabung melanjutkan perang dengan Inggris dan sekutunya yang juga terjadi di Indonesia mengakibatkan kepulauan Nusantara menjadi jajahan Inggris dimulai dari Sumatera Barat dan Maluku. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan perang koloni Belanda, daerah jajahan dijadikan wilayah eksploitasi khususnya bidang ekonomi. Selama perang tersebut menyebabkan Belanda mengalami penurunan tajam ekonomi karena perbendaharaan kosong dan adanya hutang luar negeri tambahan. Untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, pemerintah kolonial berusaha memanfaatkan potensi Nusantara dengan menerapkan sistem tanam paksa.

Tanam paksa telah mencapai hasil yang bagus dalam meningkatkan perekonomian dan pemerintah kolonial Belanda, sehingga penduduk mereka terbebas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setelah penghapusan tanam

paksa, sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda bersifat liberal dan mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme. Peran partisipasi swasta asing dalam kegiatan ekonomi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda di antaranya orang-orang Belanda itu sendiri, Eropa dan Timur asing (Cina, India dan Arab). Perkembangan perekonomian swasta asing di Indonesia berasal dari penanaman modal eksploitasi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam penerapan sistem liberal ini, terbentuklah kelompok kapitalis (pemilik modal). Dengan bertambahnya kelompok kapitalis Eropa khususnya, memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Indonesia merdeka hingga kapitalisme berkembang di era reformasi, tercipta bentuk yang berbeda. Di era pra-kemerdekaan, kapitalis diduduki oleh penjajah. Tetapi saat ini kelompok kapitalis bukan hanya pengusaha dengan modal besar, namun masuk juga kelompok penguasa.

### E. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Deskripsi	Perbedaan
1	Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Kawasan Berikat Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan (Amirah, 2017:	Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif, serta sumber data didapat dengan studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan: adanya pembatasan waktu dan jabatan dalam penggunaan TKA sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (4). Pada prinsipnya pemanfaatan TKA di Indonesia	Terletak pada metode penelitian, yang akan digunakan oleh penulis ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi

	Universitas Sumatera Utara)	dilakukan dengan dua cara yaitu TKA yang membawa modal dan / atau keterampilan dalam rangka transfer ilmu atau keahlian. Selain alasan kedua hal tersebut, pada hakikatnya TKA tidak diperbolehkan	
2	Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan (Studi Implementasi Keputusan Menteri No.150 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan (Helda Rozalea, 2013. Universitas Mulawarman)	Bertujuan menjelaskan dan menganalisa penanganan pemutusan hubungan kerja di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Tarakan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanganan PHK di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Pengumpulan data didapat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.	Teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu studi pustaka dan analisis data menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk (Kognisi Sosial)
3	Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik (Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Digunakan pula pendekatan dan model dalam kebijakan publik,	Terletak pada pendekatan yang digunakan berupa pendekatan fenomenologi dan teori, yaitu teori

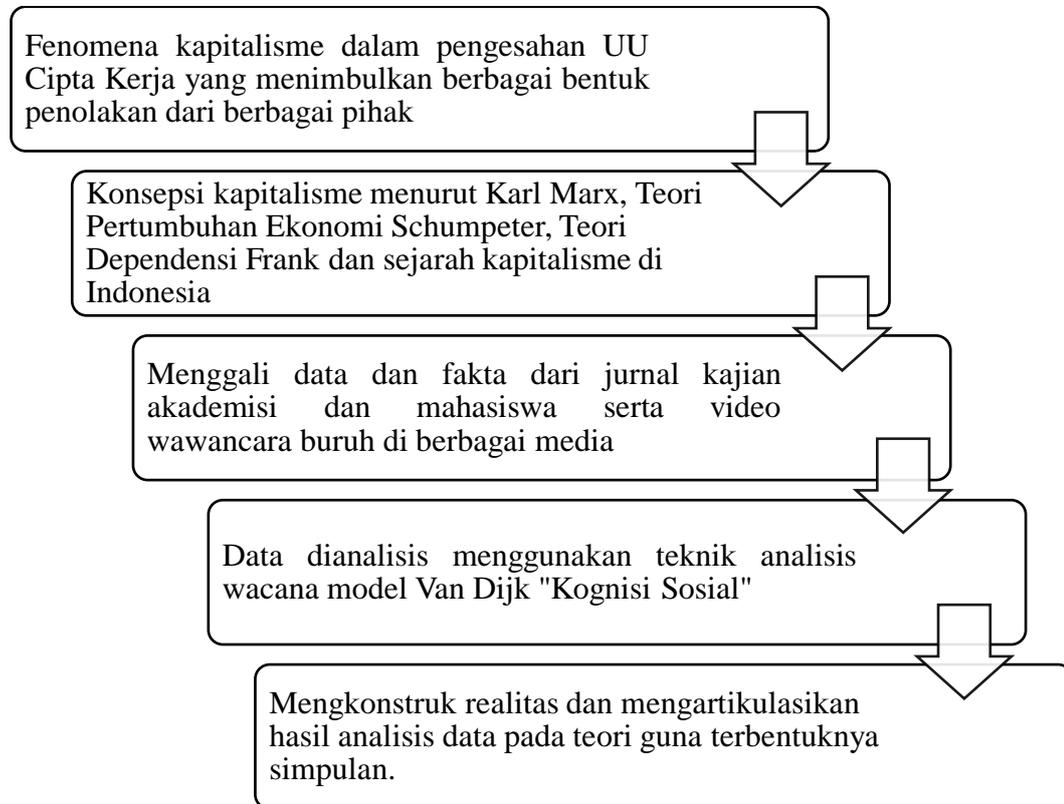
	Mendirikan Bangunan dalam Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017). Oleh; Anisa Nur Rohmah, 2018. UIN Syarif Hidayatullah.	yakni model elite, aktor dalam pembuatan kebijakan publik serta pendekatan kelembagaan. Teori yang digunakan ialah teori moderniasi Rostow yaitu: teori lima tahap pertumbuhan menurut Rostow dan teori tabungan & investasi serta <i>rent-seeking</i> .	kapitalisme menurut Adam Smith, Karl Marx dan Max Weber.
--	---	--	--

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

Yang menjadi pembeda utama penelitian ini dengan dengan penelitian terdahulunya ialah berada pada masalah yang diangkat. Sebagaimana diketahui bahwa UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baru disahkan beberapa bulan lalu, menjadikan penelitian ini sebagai usulan penelitian (skripsi) pertama yang mengambil persoalan tersebut.

## F. Kerangka Pemikiran

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran



Berbagai bentuk penolakan akibat pengesahan UU Cipta Kerja akan digali datanya melalui studi pustaka, yaitu dokumentasi (berita, video wawancara dan jurnal/kajian). Selanjutnya data dianalisis dengan analisis wacana Van Dijk yang terbagi pada tiga dimenis, yaitu: teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Hasil analisis data yang berupa realitas kemudian dihubungkan dengan teori sehingga dapat ditarik satuan simpulan.